

Ahmad Doli Kurnia Ungkap Tiga Isu Krusial Dalam Pembahasan Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya

Updates. - [KLIKINDONESIA.ID](https://klikindonesia.id)

Aug 30, 2022 - 14:50



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

JAKARTA - Ketua Komisi II [DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung](https://dpr.go.id) mengungkapkan tiga isu krusial dalam Pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut terungkap dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Papua Barat Daya di ruang rapat Komisi II [DPR RI](https://dpr.go.id), Senayan, [Jakarta](https://jakarta.go.id), Selasa, (30/8/2022).

Permasalahan pertama terkait ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Pasalnya,

dalam draf yang disusun Komisi II DPR tertulis ibukota Provinsi yang tengah dibentuk itu adalah [Kota Sorong](#). Sementara kebanyakan masyarakat Papua berharap agar ibukota Provinsi Papua Barat Daya terletak di Kabupaten [Sorong](#).

"Jadi mereka itu inginnya agak di pinggir, di antara [Tambrau](#), Maybrat, sama Kabupaten [Sorong](#), dan [Sorong](#) Selatan, tapi lokasinya itu di Kabupaten [Sorong](#). Dan memang di [Kota Sorong](#) itu sudah tidak ada lahan lagi untuk membangun pemerintahan baru," ungkap Doli.

Selain penentuan Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, isu krusial yang juga mencuat dalam pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya adalah cakupan wilayah. Komisi II DPR dalam draftnya menilai cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya itu meliputi [Kota Sorong](#), Kabupaten [Sorong](#), Kabupaten [Sorong](#) Selatan, Kabupaten [Raja Ampat](#), Kabupaten [Tambrau](#), dan Kabupaten Maybrat.

Sedangkan terkait dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten [Fakfak](#) dan Kabupaten [Kaimana](#) masih ada perdebatan di masyarakat dari kedua kabupaten tersebut. Sebagian masyarakat ingin berada di Provinsi Papua Barat Daya, sementara sisanya tetap ingin berada di [Papua Barat](#).

"Kemarin setelah dari [Sorong](#), Kami berkesempatan berkunjung ke Kabupaten [Fakfak](#), ketemu dengan masyarakat, kepala suku, dan raja-raja disana. Mereka kurang berkenan untuk bergabung di Papua Barat Daya," aku Politisi dari Fraksi Partai [Golkar](#) ini.

Masalah lainnya yang ikut mencuat dalam pembahasan RUU Papua Barat Daya adalah permasalahan yang berada di Kabupaten [Tambrau](#). Ia menjelaskan, pada pemilihan kepala daerah yang lalu terdapat istilah 'meminjamkan' distrik dari Kabupaten [Manokwari](#) kepada Kabupaten [Tambrau](#).

Usai pemilihan kepala desa, empat distrik yang dipinjamkan Kabupaten [Manokwari](#) kemudian terpecah dan menjadi 11 distrik. Namun, 11 distrik itu ternyata masih berada dalam pinjaman Kabupaten [Tambrau](#).

"Ini agak aneh, lebih lucu lagi istilahnya check in dan check out, bener Pak Mardani. Jadi mereka datang ke sini, jadi dulu itu mungkin ada kepentingan pemilihan kepala daerah, jadi ada perjanjian check in yang nanti sewaktu-waktu akan bisa check out. Empat distrik dari Kabupaten [Manokwari](#) di-check in kan ke [Tambrau](#)," ujar Doli.

Oleh karena itu, lanjut Doli, yang membuat pihaknya heran, dalam otonomi daerah ada istilah check in dan check out. Sebenarnya urusan check in, check out ini sepertinya, kalau saya tidak ada hubungannya dengan pembentukan provinsi. "Ini tentu jadi PR (Pekerjaan rumah) kita bersama," tegasnya. (ayu/aha)